

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Jln. Raya Pelabuhan Lembar No.9 Lembar-Lombok Barat


KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

diM. ARIN LUNG M.Si
NIP. 196510101992031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan


- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan
 - C.1.2. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas


- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

dit. ARINALUNG M.Si
NIP. 196510101992031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp651.819.249,00 atau mencapai 155,20% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp420.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp14.558.740.051,00 atau mencapai 99,18% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.679.539.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.779.660.431,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp393.956.194,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp40.385.704.237,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.779.660.431,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp598.477.054,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.706.399.073,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14.107.922.019,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp39.192.892,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14.068.729.127,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp40.935.908.763,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14.068.729.127,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-110.378.007,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.022.858.802,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp40.779.660.431,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	420.000.000,00	651.819.249,00	155,20	618.889.700,00
Jumlah Pendapatan		420.000.000,00	651.819.249,00	155,20	618.889.700,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.928.084.000,00	6.913.027.224,00	99,78	6.609.784.086,00
Belanja Barang	B.4.	6.366.758.000,00	6.271.147.041,00	98,50	5.083.173.553,00
Belanja Modal	B.5.	1.384.697.000,00	1.374.565.786,00	99,27	3.108.111.400,00
Jumlah Belanja		14.679.539.000,00	14.558.740.051,00	99,18	14.801.069.039,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.	0,00	90,00
Persediaan	C.1.2.	393.956.194,00	375.711.759,00
Jumlah Aset Lancar		393.956.194,00	375.711.849,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	20.899.924.000,00	20.899.924.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11.145.335.807,00	10.208.832.566,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	17.827.404.039,00	17.512.553.039,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	537.790.825,00	520.479.280,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-10.024.750.434,00	-8.581.591.971,00
Jumlah Aset Tetap		40.385.704.237,00	40.560.196.914,00
Jumlah Aset		40.779.660.431,00	40.935.908.763,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	40.779.660.431,00	40.935.908.763,00
Jumlah Ekuitas		40.779.660.431,00	40.935.908.763,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		40.779.660.431,00	40.935.908.763,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	598.477.054,00	570.114.623,00
JUMLAH PENDAPATAN		598.477.054,00	570.114.623,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.913.027.224,00	6.609.784.086,00
Beban Persediaan	D.3.	371.715.570,00	400.039.526,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3.361.167.485,00	2.872.938.452,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.054.474.478,00	1.263.834.564,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.521.433.860,00	601.666.457,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.484.580.456,00	1.341.806.256,00
JUMLAH BEBAN		14.706.399.073,00	13.090.069.341,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-14.107.922.019,00	-12.519.954.718,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	53.342.105,00	30.950.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0,00	262.969,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	25.399.364,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	14.149.213,00	4.556.816,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		39.192.892,00	51.529.579,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14.068.729.127,00	-12.468.425.139,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	40.935.908.763,00	39.133.246.753,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-14.068.729.127,00	-12.468.425.139,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-110.378.007,00	131.560,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	-110.378.007,00	131.560,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	14.022.858.802,00	14.270.955.589,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-156.248.332,00	1.802.662.010,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	40.779.660.431,00	40.935.908.763,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan Rencana Strategis BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM telah menetapkan Rencana Strategis antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Tambah, daya saing, dan pemasaran/ ekspor komoditas pertanian di Nusa Tenggara Barat
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur
3. Perlindungan Kelestarian sumberdaya pertanian
4. Fasilitasi Perdagangan ekspor produk pertanian
5. Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina
6. Keberpihakan sistem perkarantinaan pada kepentingan masyarakat.
7. Meningkatkan kemampuan deteksi resiko
8. Meningkatkan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelayanan informasi
9. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang konsisten terhadap kebijakan, standar, teknik, dan metoda karantina
10. Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum.
11. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai
12. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi.
13. Meningkatkan efektifitas pengendalian intern
14. Meningkatkan pengawasan lalu lintas HPHK/OPTK di Wilayah kerja

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM pada periode tahun anggaran 2020 yang akan dilaksanakan dalam 1 (Satu) kegiatan strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dibentuk berdasarkan PERMENTAN NO.22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008 yang merupakan penggabungan dari Balai Karantina hewan Kelas II Lembar dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Lembar. Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Sub.Bagian Tata Usaha, Seksi Karantina Hewan, Seksi Karantina Tumbuhan dan Seksi Pengawasan dan Penindakan. serta dalam melaksanakan penyelenggaraan karantina dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram memiliki wilayah kerja meliputi Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan penyeberangan Labuhan Lombok, Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Pelabuhan Pemenang, yang keseluruhannya didukung oleh 89 orang personal, yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 5 Orang
- Pejabat Umum : 19 Orang
- Pengendali OPT Ahli : 11 Orang
- Pengendali OPT Terampil : 17 Orang
- Medik Veteriner : 14 Orang
- Paramedik Veteriner : 24 Orang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian NO.22/Permentan/ OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM Kementerian Pertanian mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugasnya, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, per-lakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.
10. Pengawasan terhadap media pembawa HPHK maupun OPTK dilaksanakan disetiap pintu pemasukan maupun pintu pengeluaran/ atau Wilayah Kerja yang sudah ditetapkan

A.1.1. RUH, VISI DAN MISI

Ruh

Ruh penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia yaitu Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan

umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Visi

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM mempunyai Visi

“Terwujudnya Karantina Pertanian yang tangguh, dan terpercaya ”

Tangguh : Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram sebagai benteng terdepan harus mampu melindungi wilayah ini dari ancaman masuknya HPHK dan OPTK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, Pelaksanaan Karantina Pertanian harus jelas, tegas dan konsisten, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpercaya : Jujur dan bertanggung jawab dan konsisten dalam pelaksanaan tugas serta transparan. Karantina Pertanian harus mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi pada tugas pokok dan fungsi, kreatif dan tanggap terhadap tuntutan publik, efisien dan efektif serta ilmiah dalam pelaksanaan setiap kegiatan

Misi

Untuk mencapai visi diatas, BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM akan melaksanakan misi antara lain, yaitu :

1. Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumber daya alam hayati dan pertanian yang ada di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram.
2. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional
3. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi perkarantinaaan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing melalui standar sertifikasi karantina Internasional

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	415.000.000,00	415.000.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan	420.000.000,00	420.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.852.133.000,00	6.240.172.000,00
Belanja Lembur	700.008.000,00	687.912.000,00
Belanja Barang Operasional	1.931.282.000,00	2.038.571.000,00
Belanja Barang Non Operasional	475.905.000,00	463.454.000,00
Belanja Barang Persediaan	294.000.000,00	335.054.000,00
Belanja Jasa	1.019.600.000,00	906.371.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.115.389.000,00	1.068.417.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.521.170.000,00	1.554.891.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.189.341.000,00	1.052.298.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.046.711.000,00	314.978.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	17.421.000,00
Jumlah Belanja	16.145.539.000,00	14.679.539.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp651.819.249,00 atau mencapai 155,20% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp420.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	54.406.469,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	798.105,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	5.000.000,00	6.900.000,00	138,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	415.000.000,00	589.714.675,00	142,10
Jumlah	420.000.000,00	651.819.249,00	155,20

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,32% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	54.406.469,00	32.014.364,00	69,94
Pendapatan Denda	798.105,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	6.900.000,00	8.280.000,00	-16,67
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	589.714.675,00	560.770.169,00	5,16
Pendapatan Lain-Lain	0,00	17.825.167,00	- 100,00
Jumlah	651.819.249,00	618.889.700,00	5,32

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp14.558.740.051,00 atau 99,18% dari anggaran belanja sebesar Rp14.679.539.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6.928.084.000,00	6.919.460.487,00	99,88
Belanja Barang	6.366.758.000,00	6.273.040.041,00	98,53
Belanja Modal	1.384.697.000,00	1.374.565.786,00	99,27
Total Belanja Kotor	14.679.539.000,00	14.567.066.314,00	99,23
Pengembalian Belanja		-8.326.263,00	0.00
Total Belanja	14.679.539.000,00	14.558.740.051,00	99,18

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -1,64% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya sisa anggaran belanja barang yang tidak dapat terealisasi karena kondisi pandemic covid 19.
2. Adanya belanja modal yang tidak dapat dioptimalisasi

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	6.913.027.224,00	6.609.784.086,00	4,59
Belanja Barang	6.271.147.041,00	5.083.173.553,00	23,37
Belanja Modal	1.374.565.786,00	3.108.111.400,00	-55,77
Total Belanja	14.558.740.051,00	14.801.069.039,00	-1,64

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.913.027.224,00 dan Rp6.609.784.086,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,59% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

2. Belanja pegawai mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan gaji berkala

3. Belanja pegawai mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan pangkat pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.231.631.487,00	5.806.202.408,00	7,33
Belanja Lembur	687.829.000,00	805.034.000,00	-14,56
Jumlah Belanja Kotor	6.919.460.487,00	6.611.236.408,00	4,66
Pengembalian Belanja Pegawai	-6.433.263,00	-1.452.322,00	342,96
Jumlah Belanja	6.913.027.224,00	6.609.784.086,00	4,59

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.271.147.041,00 dan Rp5.083.173.553,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 23,37% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kebutuhan atas tambahan kegiatan perkarantinaan (Gratiex)

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.012.113.814,00	1.884.028.622,00	6,80
Belanja Barang Non Operasional	453.302.657,00	244.160.762,00	85,66
Belanja Barang Persediaan	334.071.218,00	350.845.330,00	-4,78
Belanja Jasa	895.751.014,00	738.637.818,00	21,27
Belanja Pemeliharaan	1.054.474.478,00	1.263.834.564,00	-16,57
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.523.326.860,00	601.966.457,00	153,06
Jumlah Belanja Kotor	6.273.040.041,00	5.083.473.553,00	23,40
Pengembalian Belanja Barang	-1.893.000,00	-300.000,00	531,00
Jumlah Belanja	6.271.147.041,00	5.083.173.553,00	23,37

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.374.565.786,00 dan Rp3.108.111.400,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -55,77% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal mengalami penurunan sesuai dengan pagu yang diberikan

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.042.403.241,00	2.756.693.400,00	-62,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.851.000,00	351.418.000,00	-10,41
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.311.545,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.374.565.786,00	3.108.111.400,00	-55,77
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.374.565.786,00	3.108.111.400,00	-55,77

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.042.403.241,00 dan Rp2.756.693.400,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -62,19% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.042.403.241,00	2.756.693.400,00	-62,19
Jumlah Belanja Kotor	1.042.403.241,00	2.756.693.400,00	-62,19
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.042.403.241,00	2.756.693.400,00	-62,19

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp314.851.000,00 dan Rp351.418.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -10,41% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Karena adanya refocusing anggaran

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	314.851.000,00	351.418.000,00	-10,41
Jumlah Belanja Kotor	314.851.000,00	351.418.000,00	-10,41
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	314.851.000,00	351.418.000,00	-10,41

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.311.545,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pembelian/Penambahan jaringan listrik

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.311.545,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	17.311.545,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	17.311.545,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp90,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp393.956.194,00 dan Rp375.711.759,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	393.956.194,00	375.711.759,00
Jumlah	393.956.194,00	375.711.759,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.899.924.000,00 dan Rp20.899.924.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.145.335.807,00 dan Rp10.208.832.566,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	10.208.832.566,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.042.403.241,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-151.800.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	11.145.335.807,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-7.816.259.400,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.329.076.407,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pengadaan kendaraan dinas R.2
2. Pengadaan genset.
3. Pengadaan meubelair
4. Pengadaan AC
5. Pengadaan kulkas dan dispenser.
6. Pengadaan alat laboratorium
7. Pengadaan alat pengolah data

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.827.404.039,00 dan Rp17.512.553.039,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	17.512.553.039,00
Mutasi Tambah	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	408.388.969,00
Pengembangan Melalui KDP	314.851.000,00
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-408.388.969,00
Saldo per 31 Desember 2021	17.827.404.039,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-2.108.123.426,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	15.719.280.613,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pembuatan jalan penghubung
2. Pengembangan teras kantor
3. Rehab atap rumah dinas
4. Penyekatan/ partisi

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp537.790.825,00 dan Rp520.479.280,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	520.479.280,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17.311.545,00
Saldo per 31 Desember 2021	537.790.825,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-100.367.608,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	437.423.217,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Penambahan jaringan listrik di Wilker Bandara Internasional Lombok

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-10.024.750.434,00 dan Rp-8.581.591.971,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.145.335.807,00	-7.816.259.400,00	3.329.076.407,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.827.404.039,00	-2.108.123.426,00	15.719.280.613,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	537.790.825,00	-100.367.608,00	437.423.217,00
Akumulasi Penyusutan		29.510.530.671,00	-10.024.750.434,00	19.485.780.237,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.779.660.431,00 dan Rp40.935.908.763,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp598.477.054,00 dan Rp570.114.623,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	798.105,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	589.714.585,00	560.770.259,00	5,16
Pendapatan Jasa Lainnya	6.900.000,00	8.280.000,00	-16,67
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.064.364,00	1.064.364,00	0,00
Jumlah	598.477.054,00	570.114.623,00	4,97

1. Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan maubelair
2. Penerimaan Negara bukan pajak
3. Pendapatan jasa lainnya
4. Pendapatan sewa rumah dinas

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.913.027.224,00 dan Rp6.609.784.086,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.120.839.260,00	3.877.982.500,00	6,26
Beban Pembulatan Gaji PNS	63.774,00	55.950,00	13,98
Beban Tunj. Anak PNS	109.305.126,00	107.612.782,00	1,57
Beban Tunj. Beras PNS	280.289.580,00	233.047.560,00	20,27
Beban Tunj. Fungsional PNS	609.762.000,00	494.820.000,00	23,23
Beban Tunj. PPh PNS	11.389.100,00	6.842.664,00	66,44
Beban Tunj. Struktural PNS	39.780.000,00	47.340.000,00	-15,97
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	321.389.384,00	301.256.680,00	6,68
Beban Tunjangan Umum PNS	52.185.000,00	56.714.950,00	-7,99
Beban Uang Lembur	687.829.000,00	805.034.000,00	-14,56
Beban Uang Makan PNS	680.195.000,00	679.077.000,00	0,16
Jumlah	6.913.027.224,00	6.609.784.086,00	4,59

1. Adanya kenaikan pangkat pegawai
2. Kenaikan gaji berkala

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp371.715.570,00 dan Rp400.039.526,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	371.715.570,00	400.039.526,00	-7,08
Jumlah	371.715.570,00	400.039.526,00	-7,08

Pengadaan alat tulis kantor dan dokumen utama

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.361.167.485,00 dan Rp2.872.938.452,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	381.306.157,00	200.060.762,00	90,60
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	195.973.399,00	118.897.719,00	64,83
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	172.722.000,00	196.320.000,00	-12,02
Beban Honor Output Kegiatan	71.996.500,00	44.100.000,00	63,26
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	75.111.000,00	29.546.130,00	154,22
Beban Jasa Lainnya	107.758.595,00	78.164.000,00	37,86
Beban Jasa Profesi	61.400.000,00	39.400.000,00	55,84
Beban Keperluan Perkantoran	1.332.494.111,00	1.202.913.418,00	10,77
Beban Langganan Air	26.638.440,00	20.768.300,00	28,26
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	11.467.792,00	49.671.801,00	-76,91
Beban Langganan Listrik	381.822.263,00	322.967.505,00	18,22
Beban Langganan Telepon	86.080.024,00	69.302.782,00	24,21
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	305.397.201,00	360.406.485,00	-15,26
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.527.103,00	5.491.000,00	0,66
Beban Sewa	145.472.900,00	134.928.550,00	7,81
Jumlah	3.361.167.485,00	2.872.938.452,00	16,99

Mengalami kenaikan dengan adanya kegiatan gratiek dan belanja penanganan covid 19

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.054.474.478,00 dan Rp1.263.834.564,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	363.454.608,00	605.535.400,00	-39,98
Beban Pemeliharaan Jaringan	90.385.322,00	96.627.150,00	-6,46
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.634.548,00	561.672.014,00	6,94
Jumlah	1.054.474.478,00	1.263.834.564,00	-16,57

Pemeliharaan instalasi kandang, jaringan dan pemeliharaan kendaraan dinas

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.521.433.860,00 dan Rp601.666.457,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.216.459.509,00	412.518.801,00	194,89
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	78.160.000,00	44.030.000,00	77,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.140.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	208.814.351,00	137.237.656,00	52,16
Beban Perjalanan Tetap	6.860.000,00	7.880.000,00	-12,94
Jumlah	1.521.433.860,00	601.666.457,00	152,87

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

Rp1.484.580.456,00 dan Rp1.341.806.256,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	502.445.690,00	479.135.826,00	4,87
Beban Penyusutan Irigasi	3.274.236,00	3.274.236,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.915.833,00	2.915.833,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	12.123.032,00	11.690.244,00	3,70
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	963.821.665,00	844.790.117,00	14,09
Jumlah	1.484.580.456,00	1.341.806.256,00	10,64

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-262.969,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-4.556.816,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-14.149.213,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	9.218.697,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	5.250.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	53.342.105,00	25.700.000,00	107,56

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.921.067,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	9.259.600,00	-100,00
Jumlah	39.192.892,00	51.529.579,00	-23,94

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.935.908.763,00 dan Rp39.133.246.753,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-14.068.729.127,00 dan Rp-12.468.425.139,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-110.378.007,00 dan Rp131.560,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-110.378.007,00 dan Rp131.560,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-110.378.007,00
Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah	-110.378.007,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.022.858.802,00 dan Rp14.270.955.589,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.558.740.051,00
Diterima dari Entitas Lain	-651.819.249,00
Transfer Masuk	115.938.000,00
Jumlah	14.022.858.802,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-651.819.249,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.558.740.051,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp115.938.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	70.038.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	45.900.000,00
Jumlah			115.938.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-156.248.332,00 dan Rp1.802.662.010,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Silahkan diberikan penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pengelola anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : drh. ARINAUNG M.Si
2. Bendahara Pengeluaran : Nur'aini, A.Md
3. Pejabat Pembuat Komitmen : drh. I Made Nurata
4. Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSALEH, SE.
5. Penguji dan Penerbit SPM : DIRMAN, SE

Selama tahun 2021 telah dilakukan revisi DIPA maupun POK antara lain sebagai berikut :

- 1 DIPA awal Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2021 tanggal 23-11-2020.
- 2 DIPA Revisi 1 Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2021 tanggal 16-02-2021
- 3 DIPA Revisi 2 Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2021 tanggal 09-03-2021
- 4 DIPA Revisi 3 Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2021 tanggal 26-04-2021
6. DIPA Revisi 4 Nomor : DIPA-018.12.2.499471/2021 tanggal 14-06-2021